



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanggulangan bencana di Provinsi NTT berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LAKIP BPBD ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini telah dapat mencerminkan kinerja BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018.

Kupang, 11 Januari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



TINI THADEUS, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTISAR	iii
PERJANJIAN KINERJA	iv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	v
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	2
I. Struktur Organisasi	3
1. Bagan Struktur Organisasi	3
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Sarana dan Prasarana	6
II. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1. Tugas Pokok	7
2. Fungsi	8
D. DASAR HUKUM	8
E. SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. VISI DAN MISI.....	12
1. Visi	12
2. Misi	12
B. TUJUAN SASARAN	13
1. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	13
2. Tujuan dan Sasaran	13
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	15
D. RENCANA KERJA TAHUNAN 2018.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA BPBD PROVINSI NTT	20
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BPBD PROV NTT	27
BAB IV P E N U T U P.....	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, sebagai Badan baru BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan beban dan tanggungjawab sebagai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dalam tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, laporan Akuntabilitas Kinerja 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam melaporkan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2018 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013 – 2018. Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat rutin SKPD yang terdiri dari 3 program dengan nilai Rp **1,101,372,680** dan program wajib SKPD yang terdiri dari 1 (satu) Program dan 4 Sasaran Strategis dengan total anggaran Rp **4,996,898,000** Dari total pagu terealisasi sebesar Rp. **4,634,055,854** atau **92,74 %**.

Kupang, 11 Januari 2018

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



TINI THADEUS, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198603 1 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara antara lain : azas kepentingan umum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah sebagai penyelenggara Pemerintahan pada Daerah Otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat Daerah Otonom

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dengan demikian Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan laporan pertanggungjawaban dimaksud berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan selain sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga dimaksudkan untuk sebagai acuan dalam memformulasikan ukuran kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran 2018 yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
2. Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
3. Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk kemudian diperoleh masukkan dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun-tahun berikutnya.

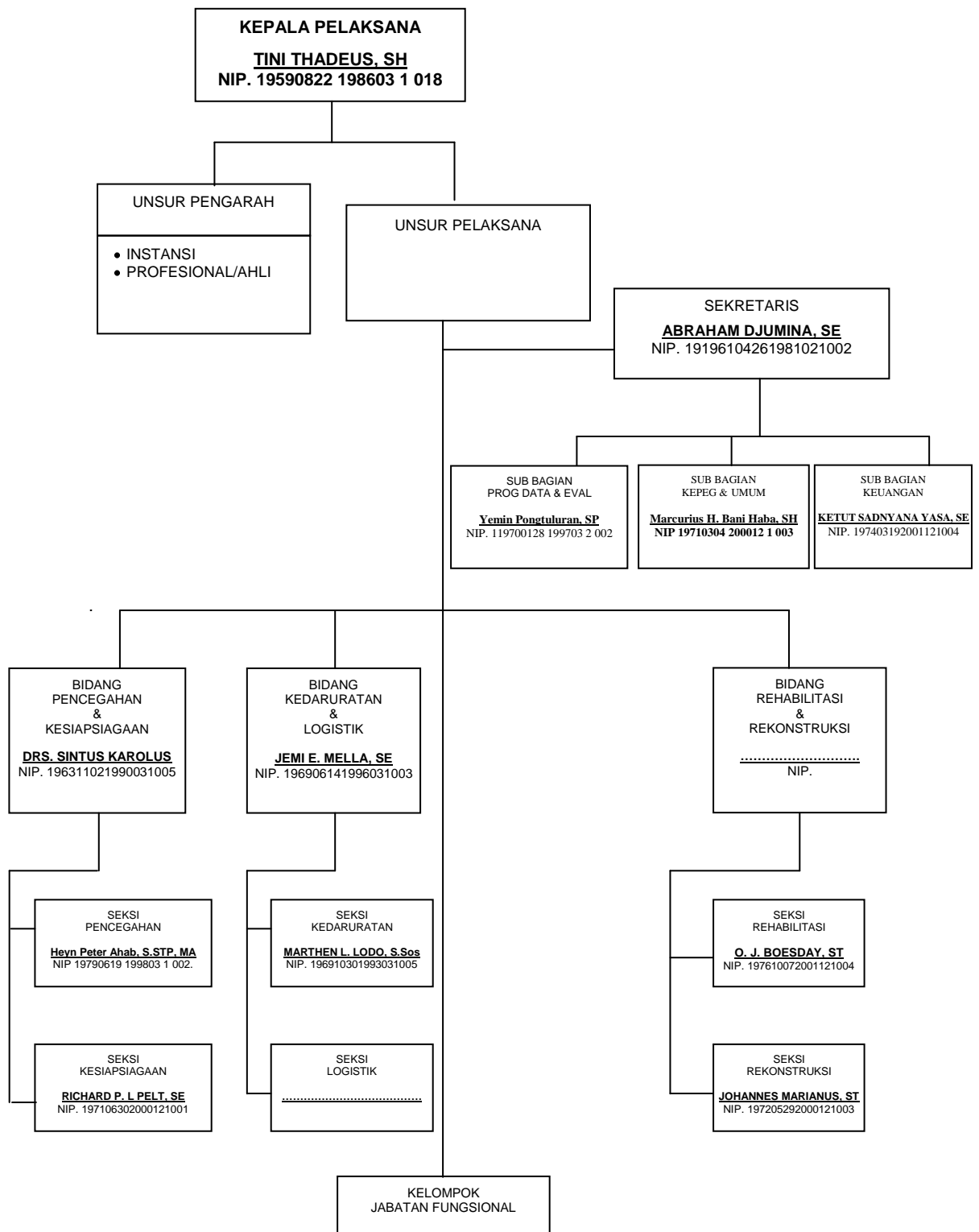
C. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

I. Struktur Organisasi

1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang dibantu dengan satu Sekretaris dan tiga Kepala Bidang serta tiga Kepala Sub Bagian dan enam Kepala Seksi seperti yang terlihat pada struktur dibawah ini.



1. Kepala yang dalam hal ini adalah Sekda Provinsi NTT sebagai Exoficio membawahi :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD ;
 - b. Unsur Pengarah;
2. Kepala Pelaksana BPBD membawahi:
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
3. Sekretariat membawahi:
 - a. Subbag Program Data dan Evaluasi;
 - b. Subbag Kepegawaian dan Umum;
 - c. Subbag Keuangan.
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - a. Seksi kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memadai. Dan dari segi kualitas masih sangat perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Komando, Pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Pelaksana	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	-	1	1
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	-	1	1
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	-	1
6	Kasubbag Program Data dan Evaluasi	-	-	1	-	1
7	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	-	-	1	-	-
8	Kasubbag Keuangan	-	-	1	-	1
9	Kasi Pencegahan	-	-	-	1	1
10	Kasi Kesiapsiagaan	-	-	1	-	1
11	Kasi Kedaruratan	-	-	1	-	1
12	Kasi Logistik	-	-	-	-	-
13	Kasi Rehabilitasi	-	-	-	1	1
14	Kasi Rekonstruksi	-	-	1	-	1
15	Staf Pelaksana	1	11	23	-	35
	JUMLAH	1	11	29	6	47

Sampai saat ini jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 47 orang. Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 26 orang dan yang berpendidikan D-II/ D-IV berjumlah 2 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA berjumlah 16 orang dan yang berpendidikan SD 1 orang. Dapat pula dilihat pada table 2 dibawah ini.

Table 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA (S2)	2
2	SARJANA	26
3	D-II / D-IV	2
4	SLTA	16
5	SD	1
	JUMLAH	47

3. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sarana dan prasarana pendukung TUPOKSI Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai saat ini tergambar sebagai berikut, lihat tabel 3.

Tabel 3
Daftar Sarana – Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	
		Dibutuhkan	Tersedia
1	Bangunan Kantor	2	2
2	Printer	20	6
3	Handy Talky (HT)	30	28
4	White Board	6	5
5	Laptop	20	8
6	TV. Monitor	6	6
7	Sound System	1 set	1 set
8	Infocus	5	2
9	Komputer	15	10
10	Meja Komputer	15	6
11	Stabilizer (UPS)	15	6
12	Komputer server	1	1
13	Router jaringan	1	1
14	Router Wifi	2	3
15	Switch 5 port	4	3
16	Radar	1	1
17	Fish Finder	1	1
18	GPS	1	1
19	Serine	1	1
20	Aplikasi Website	1 Paket	1 Paket
21	Mesin Tik	5	3
22	Facsimile	4	1
23	Camera Digital	2	1

No.	Nama Barang	Jumlah	
		Dibutuhkan	Tersedia
24	Handycam	3	2
25	AC	15	11
26	Pesawat Telpon	3	1
27	Meja Kerja (biro) Pimpinan	16	9
28	Meja Staf (1/2 biro) Staf	98	62
29	Kursi Pimpinan	13	9
30	Kursi Staf	98	62
31	Almari Pimpinan	15	7
32	Almari Staf	12	5
33	Sofa Tamu	6 zet	2 zet
34	Grasi Mobil	3	1 (ukuran 7x12 m)
35	Kapal	2	2
36	Kendaraan	21 Unit	-
37	Radio Komunikasi dan Perlengkapannya	1 paket	3 paket
38	Kursi Lipat	30 buah	30 buah
39	Alat dokumentasi	1 set	1 set

II. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan, dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksana penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

D. DASAR HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018;

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LAKIP

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LAKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LAKIP tersebut

C. Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan iktisar dan gambaran singkat mengenai Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018

A. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sasaran

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing-masing tujuan yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing-masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan

D. Rencana Kerja Tahun 2018

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing fungsi dan urusan/bidang kewenangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akuntabilitas keuangannya.

Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi anggaran tahun 2018 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target dan realisasi keuangan persasaran.

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan mengenai hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasinya dan dilakukan analisis kendala/hambatannya dan rumusan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Sedangkan terhadap capaian indikator sasaran yang memenuhi atau lebih tinggi dari target diuraikan faktor-faktor yang mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

B. Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2018
berserta rincian belanja persasaran.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai dasar penyusunan rencana strategis maka perlu ditetapkan Visi sebagai alat pemersatu gerak langkah dan cita-cita yang ingin dicapai suatu instansi dimasa yang akan datang.

A. VISI dan MISI

1. Visi

Visi merupakan cita-cita atau wawasan masa depan yang rasional dan ingin dicapai pada waktu tertentu dengan dilatar belakangi oleh kondisi, potensi, tantangan dan peran suatu instansi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTT SIAGA BENCANA”

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut diatas maka perlu ditetapkan adanya misi sebagai dasar untuk membangun pondasi yang kuat dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan. Misi yang dirumuskan Membangun ketahanan Masyarakat dalam Siaga Bencana dengan prioritas rencana aksi pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan (Recovery) yakni adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis Pengurangan Risiko Bencana
2. Mengoptimalkan pelayanan logistik, pemanfaatan peralatan dan pengerahan sumber daya manusia dalam kondisi tanggap darurat
3. Meningkatkan upaya pemulihan masyarakat dan membangun sarana prasarana korban bencana;
4. Meningkatkan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Faktor-faktor penentu keberhasilan

Analisis terhadap faktor yang menentukan keberhasilan merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi perencanaan dan Penetapan Kinerja. Selanjutnya faktor-faktor penentu keberhasilan memberikan acuan atau strategi organisasi dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi.

Perumusan faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh melalui analisis lingkungan eksternal maupun internal dengan melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan atau hambatan yang sering disebut Analisis SWOT.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat
2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana
3. Mewujudkan penanganan kondisi darurat yang didukung logistik, peralatan dan pengerahan sumber daya manusia secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
4. Terlaksananya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai bagi korban bencana
5. Menyediakan data dan informasi bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana
6. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan pemangku kepentingan bidang kebencanaan

b. Sasaran

Untuk mewujudkan “tujuan” tersebut di atas, maka tujuan di jabarkan menjadi sasaran-sasaran. Sasaran dan indikator pencapaian sasaran dirinci sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BAGIAN PELAKSANA
1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pengurangan Risiko Bencana bagi masyarakat dan - Melindungi masyarakat dari ancaman bencana - Menyediakan data dan informasi bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pascabencana - Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan pemangku kepentingan bidang kebencanaan 	Optimalisasi sistem kewaspadaan dini bencana	Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi	BPBD Prov. NTT
			Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT	BPBD Prov. NTT
			Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota	BPBD Prov. NTT
			Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	BPBD Prov. NTT
2.	Mewujudkan penanganan kondisi darurat yang didukung logistik, peralatan dan pengerahan sumber daya manusia secara cepat, tepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	Percepatan penanggulangan korban bencana	Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT	BPBD Prov. NTT
			Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat	BPBD Prov. NTT
3	Terlaksananya Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memadai bagi korban bencana	Pemulihan Pasca Bencana	Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana	BPBD Prov. NTT
			Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana	BPBD Prov. NTT

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun perencanaan strategi pembangunan. Strategi dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan dan program pembangunan dikelompokkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjaga keselarasan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui perencanaan dan perjanjian kinerja maka program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan program yang telah tercantum dalam RPJM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana.

Kebijakan yang ditempuh adalah “meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dalam wadah kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KMPB)”.

Kegiatan utama:

- Meningkatkan pengembangan budaya sadar bencana.
- Meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan hidup secara baik.

2. Terwujudnya komitmen pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana.

Kebijakan yang ditempuh adalah “Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari undang-undang Penanggulangan Bencana”.

Kegiatan utama:

- Implementasi pengurangan risiko bencana ditingkat komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mendasari bencana.
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Rencana Kontijensi Pengurangan Risiko Bencana.
- Terus melakukan perubahan-perubahan dalam Peraturan Daerah tentang kebencanaan karena masih relatif belum lengkap sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar hukum dan kebijakan tidak menjadi hambatan dan kendala bagi penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana.

- Mengoptimalkan potensi dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana berupa pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat atau rekonstruksi di berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat desa.
3. Meningkatkan kerjasama antar komponen dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- Kebijakan yang ditempuh adalah “Melakukan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LSM, Lembaga Non Pemerintah Internasional (NGO), UN/PBB, Pemerintah dan Unsur Palang Merah”.
- Kegiatan utama:
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak donor yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana.
 - Membangun kerjasama ditingkat sektor terkait yang berkompeten melalui manajemen Pengurangan Risiko Bencana.
4. Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengurangi risiko bencana.
- Kebijakan yang ditempuh adalah “Perlunya penerapan dan peningkatan ilmu dan teknologi kajian risiko untuk berbagai elemen atas risiko dengan karakteristiknya yang spesifik dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pemetaan risiko”.
- Kegiatan utama:
- Meningkatkan pendekatan hubungan dengan multi sektor, multidisiplin, multibudaya.
 - Meningkatkan diklat, pelatihan, dan simulasi dalam rangka mengurangi risiko bencana.
 - Melakukan integrasi pengurangan risiko bencana kedalam pendidikan di sekolah-sekolah.
 - Mengembangkan inovasi dan mengintensifkan kegiatan pengembangan dan pengenalan terhadap berbagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berbasis teknologi tepat guna dalam rangka kesiapsiagaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi bencana.

D. RENCANA KERJA TAHUN 2018

Sasaran, indikator sasaran beserta target yang ingin dicapai tahun 2017 adalah perencanaan dan perjanjian kinerja dalam kegiatan rutin program SKPD.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun Dasar (2017)		Target
			Jml Satuan	%	2018
Optimalisasi sistem kewaspadaan dini bencana	Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi	Lokasi	1	100	1
		Lokasi	6	100	0
	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT	Lokasi/ Org	2/100	100	2/140
		Lokasi/ Org	1/40	100	4/260
		Orang	80	100	70
		Orang	65	100	90
		Orang	200	100	210
		Orang	30	100	50
		Orang	70	100	110
		Orang	70	100	60
		Lokasi/ Org	2/180		1/85
	Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota	Lokasi Bencana	7 Kab	100	8 Kab & 1 Kota
		Lokasi	22 Kab/ Kota	100	22 Kab/ Kota
		Lokasi	Lokasi Bencana	100	Lokasi Bencana
		Lokasi	Lokasi Bencana	100	Lokasi Bencana
	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Paket	1	100	1
Percepatan penanggulangan korban bencana	Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT	Paket	1	100	1
		Lokasi	22 Kab/kota,	100	22 Kab/kota,
	Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat	Orang	60	100	55
Pemulihan Pasca Bencana	Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana	-	-	-	-
	Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana	Unit	88	100	50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 dan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik untuk kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis, secara proporsional dengan baik.

Secara garis besar sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tahun 2018 dari segi Output seluruhnya telah dilaksanakan sedangkan dari segi Outcome beberapa indikator belum maksimal. Hal ini karena masih kurangnya SDM yang memadai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2018 telah melaksanakan perencanaan kinerja secara maksimal dimana penyerapan anggaran dan kegiatan terhadap tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **92,74 %** hal ini menunjukkan presentasi keberhasilan yang cukup signifikan dalam realisasinya yang terlihat dari tingginya realisasi dan kinerja. Sementara pada sisi lain permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi NTT adalah :

- Ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan BPBD Provinsi NTT disaat bencana sangat tinggi, sementara kemampuan sumber daya dan dana sangat terbatas;
- Pengurangan Risiko Bencana adalah tindakan yang meminimalisir dampak risiko bencana yang terjadi di masyarakat sehingga perlu dilakukan melalui sosialisasi, konservasi lingkungan masyarakat yang berpotensi bencana;
- Rendahnya komitmen pemangku kepentingan terhadap penanggulangan bencana di daerah ini baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota di NTT dalam mengalokasikan dana dalam dokumen perencanaan anggaran setiap tahun sangat minim.

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah nya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Badan Penggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT tahun 2018 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Optimalisasi sistem kewaspadaan dini
-----------	--------------------------------------

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan fasilitas/peralatan peringatan dini, sosialisasi/workshop/Bimtek/Rakor dan pengumpulan data kebencanaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Kegiatan – kegiatan yang mendukung sasaran ini memiliki dana sebesar Rp 2.716.140.600 (Dua milyar tujuh ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah)

Tabel 1.Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Optimalisasi sistem kewaspadaan dini

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra 2018
				Target	Realisasi		
1	Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT	Kali	47	9	9	100	50
3	Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota	Kali	22	22	22	100	22
4	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Kali	29	29	29	100	29
	Rata-rata					100	

1. Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi

Presentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi melalui kegiatan pemasangan tanda peringatan/larangan memasuki daerah rawan bencana sangat kecil dikarenakan alokasi pagu setiap tahun hanya mengakomodir 1 - 2 Kabupaten. Terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah terpasang di 16 Kabupaten/Kota (Manggarai Timur, TTS, Ende, Flores Timur, Ngada, Alor, Lembata, Kab. Kupang, Belu Sumba Timur, Sumba Tengah dan Manggarai,Manggarai Barat,TTU, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) atau (72,73%) dan pada tahun 2017 dilakukan pemasangan tanda di 6 Kabupaten yaitu Malaka, Kota Kupang, Nagekeo,Rote Ndao, Sabu Raijua dan Sikka

sehingga pada tahun 2017 menjadi 22 Kabupaten/Kota yang telah terpasang atau (100%).

2. Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT

Untuk mencapai indikator tersebut BPBD Provinsi NTT melalui kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Workshop, Penyuluhan, Pelatihan/Bimtek, Peningkatan Kapasitas, Advokasi serta Mitigasi. Sampai dengan 2017 telah dilaksanakan sebanyak 47 kali kegiatan untuk memenuhi pencapaian indikator sebanyak 50 kali kegiatan. Dan pada tahun 2018 telah anggarkan sejumlah dana untuk pelaksanaan kegiatan guna pencapaian indikator tersebut sebanyak 9 kali.

3. Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota

Presentase koordinasi data dan informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota setiap tahunnya dilakukan di 22 Kabupaten/Kota. Itu berarti capaian pada setiap tahun mencapai 100%. Berikut rangkuman data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota se Provinsi NTT tahun 2018:

NO	KABUPATEN / KOTA	GEMPA BUMI	LONGSOR	AKTIVITAS VULKANIK	BANJIR	ANGIN PUTTING BELIUNG	KEKERINGAN	GELOMBANG PASANG	KECELAKAAN TRANSPORTASI	KEBAKARAN	KONFLIK SOSIAL	KEJADIAN LUAR BIASA	ABRASI PANTAI
1	Alor	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belu	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ende	0	8	0	5	30	0	12	0	1	0	0	0
4	Flores Timur	0	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Kupang	0	11	0	0	17	0	0	0	60	0	0	0
6	Kab. Kupang	4	5	0	6	16	2	2	0	32	0	0	0
7	Lembata	0	0	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0
8	Malaka	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Manggarai	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Manggarai Barat	3	15	9	4	17	0	0	0	8	0	0	0
11	Manggarai Timur	0	12	0	5	10	3	2	0	0	0	0	0
12	Nagekeo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ngada	0	5	0	3	8	0	0	0	4	0	0	0
14	Rote Ndao	0	3	0	26	7	1	6	0	0	1	0	0
15	Sabu Raijua	0	4	0	4	7	0	4	3	24	0	0	0
16	Sikka	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
17	Sumba Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sumba Barat Daya	5	0	0	13	26	0	0	0	0	0	0	0
19	Sumba Tengah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	KABUPATEN / KOTA	GEMPA BUMI	LONGSOR	AKTIVITAS VULKANIK	BANJIR	ANGIN PUTTING BELIUNG	KEKERINGAN	GELOMBANG PASANG	KECELAKAAN TRANSPORTASI	KEBAKARAN	KONFLIK SOSIAL	KEJADIAN LUAR BIASA	ABRASI PANTAI
20	Sumba Timur	5	6	0	7	15	3	0	0	10	0	1	0
21	Timor Tengah Selatan	0	0	0	2	0	27	0	0	0	0	0	0
22	Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	20	70	11	99	186	37	26	5	139	1	1	0

4. Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh di BPBD Provinsi NTT lewat kegiatan operasional kendaraan / peralatan penanggulangan bencana. Sampai pada tahun 2017 kegiatan ini dilakukan dalam bentuk perawatan kendaraan penanggulangan bencana setiap triwulannya berupa perawatan Kapal LC (Landing Cruiser), Motor, Mobil Operasional Kantor, Mobil Water Treatment, Dapur Serba Guna, Ambulance, Communication Mobile (Comob) dan Mobil WC Umum dan Kapal Amphibi.

Dengan demikian pencapaian sasaran masuk dalam kategori **berhasil**. Hal ini akan menjadi motivasi yang positif bagi BPBD Provinsi NTT dalam upaya pengurangan resiko bencana di Provinsi NTT

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Besarnya kebutuhan anggaran penanggulangan Bencana
- Rendahnya dukungan pemangku kepentingan dalam mendukung BPBD Provinsi NTT lewat pengalokasian anggaran.
- Kurangnya keahlian aparatur dalam pemeliharaan kendaraan operasional dan kendaraan kebencanaan
- Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan untuk merubah paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana
- Topografi wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau

Adapun langkah-langkah yang dilakukan guna mengurangi hambatan dan kendala yang dihadapi :

- Memaksimalkan penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
- Bekerjasama dengan NGO, LSM lokal maupun nasional dan dunia usaha
- Membuka peluang untuk intervensi pemerintah pusat

- BPBD Kabupaten/Kota agar dapat mengalokasi sendiri dana APBD untuk pengurangan resiko bencana.
- Meningkatkan SDM aparatur dalam perawatan kendaraan operasional kebencanaan
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana

Sasaran 2	Percepatan penanggulangan korban bencana
-----------	--

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan logistik/peralatan dalam rangka tanggap darurat serta koordinasi terkait informasi dampak bencana guna penangana bencana yang lebih baik dan terarah

Kegiatan – kegiatan yang mendukung sasaran ini memiliki dana sebesar Rp 742.698.000 (Tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Percepatan penanggulangan korban bencana

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra 2018
				Target	Realisasi		
1	Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT	kali	44	22	22	100	100
2	Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat	%	22	22	22	100	100
	Rata-Rata					100	

1. Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT

Guna menunjang pencapaian indikator ini BPBD Provinsi NTT lewat kegiatan Pengadaan dukungan/stok logistik dalam rangka penanggulangan korban bencana di Kota Kupang dan Pendampingan Pendistribusian logistik , peralatan dan pengerahan staf dilokasi bencana dilaksanakan sebanyak. 44 kali pada

tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 BPBD Provinsi lewat alokasi dana yang disediakan telah melaksanakan 22 kali pendropingan. Berikut data pendropingan beserta peruntukan logistiknya :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Sifat Pendropingan		Pendanaan	
			Saat Bencana	Persediaan	APBD	APBN
1	Sumba Barat Daya	1	-	√	√	√
2	Ngada	1	-	√	√	√
3	Sikka	1	-	√	√	√
4	Manggarai	1	-	√	-	√
5	Flores Timur	1	-	√	√	√
6	Lembata	1	-	√	√	√
7	Manggarai Barat	1	-	√	√	√
8	Manggarai Timur	1	-	√	-	√
9	Alor	1	-	√	√	√
10	Sabu Raijua	1	-	√	-	√
11	Kota Kupang	1	-	√	√	√
12	Kabupaten Kupang	1	-	√	√	√
13	Rote Ndao	1	-	√	√	√
14	TTS	1	-	√	√	√
15	Belu	1	-	√	√	√
16	TTU	1	-	√	√	√
17	Ende	1	-	√	√	√
18	Sumba Timur	1	-	√	√	√
19	Sumba Tengah	1	-	√	√	√
20	Sumba Barat	1	-	√	√	√
21	Nagekeo	1	-	√	√	√
22	Malaka	1	-	√	√	√
Jumlah		22				

2. Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat

Prosentase Kab/Kota yang membentuk tim reaksi cepat sampai dengan 2018 sudah mencapai 100% .

Untuk pencapaian sasaran ini mencapai 100 % atau **sangat berhasil** dikarenakan usaha dari pemerintah yang serius menangani tanggap darurat dari pengumpulan data di lokasi bencana, penyiapan kebutuhan logistik/peralatan sampai pada pendropingan ke lokasi bencana.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Kebutuhan anggaran yang besar akan penyediaan logistik baik untuk korban bencana maupun untuk penyediaan stok bagi BPBD Kab/Kota
- Topologi Wilayah NTT yang berbentuk kepulauan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan guna mengurangi hambatan dan kendala yang dihadapi :

- Menyiapkan SDM dan Sarana Prasarana yang memadai dalam upaya penanganan bencana
- Berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam penyediaan stok logistik
- Membuka peluang untuk intervensi pemerintah pusat dalam kondisi darurat.

Sasaran 3	Pemulihan Pasca Bencana
-----------	-------------------------

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam kepeduliannya memberdayakan masyarakat pasca bencana dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana

Kegiatan – kegiatan yang mendukung sasaran ini memiliki dana sebesar Rp 224.420.000 (Dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemulihan Pasca Bencana

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2017	2018		Capaian (%)	Renstra 2018
				Target	Realisasi		
1	Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana	kali	1	1	1	100	10
2	Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana	Kali	-	-	-	-	-
	Rata-Rata						

1. Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana

Sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan bantuan sosial dalam upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana di Kabupaten Alor, Ende, Malaka, Kab. Kupang berupa 88 unit alat tenun. Dan pada tahun 2018 juga dilaksanakan pemberian bantuan alat tenun sebanyak 50 Unit di Kabupaten Ende dan TTU.

2. Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana
Dalam upaya pencapaian indikator ini Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan sejumlah dana oncall yang pengerjaannya BPBD Provinsi NTT berkoordinasi dengan instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan kegiatan perbaikan fasilitas umum dan hunian masyarakat yang rusak akibat bencana.

Untuk pencapaian sasaran ini mencapai 100 % atau **sangat berhasil** dikarenakan usaha dari Pemerintah yang serius dalam upaya perbaikan sarana prasarana yang rusak akibat bencana.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- Kebutuhan anggaran yang besar
- Topologi Wilayah NTT yang berbentuk kepulauan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan guna mengurangi hambatan dan kendala yang dihadapi :

- Berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam penyediaan data kerusakan.
- Membuka peluang untuk intervensi pemerintah pusat dalam kondisi darurat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT pada tahun 2018 bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut ;

Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT Tahun 2018

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	APBD :
	a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.190.338.000	3.891.342.161	92,86
	b. BELANJA LANGSUNG	4,996,898,000	4,634,055,854	92,74
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	901,972,680	833,509,206	92,41
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	192,500,000	159,330,141	82,77
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	6,900,000	6,890,000	99,86
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3,895,525,320	3.634,326,507	93,30
	- Optimalisasi sistem kewaspadaan dini Bencana	2,928,134,320	2,679,541,690	91,51
	- Percepatan penanggulangan korban Bencana	742,698,000	735,475,908	99,03
	- Pemulihan Pasca Bencana	224,420,000	219,308,909	97,72
2.	APBN :			
	a. Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
	b. Dana Siap Pakai Kekeringan

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun ke-4 dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang dipilih sebagai tolok ukur kinerja.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)
3. Perlu dukungan dari pemangku kepentingan atau Pemerintah Daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan pertimbangan Bappeda untuk perencanaan tahun berikutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jalan Teratai Nomor 11 Tlp.(0380) 832617-Fax. 832671

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp 3.895.252.320
Optimalisasi sistem kewaspadaan dini bencana	- Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi	100%	1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pembuatan Media Cetak elektronik, Iklan, Pressrelies dan dialog interaktif (Kota Kupang dan 22 Kab/Kota)	Rp 78.274.000
	- Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT	100%	1. Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana	Rp 229.636.000
		100%	2. Mitigasi Dalam Rangka Perlindungan Lokasi rawan Bencana	Rp 274.240.000
		100%	3. Bimbingan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Gender	Rp 83.344.000
		100%	4. Pelatihan Teknis Operasional dalam pengelolaan peralatan, logistik dan pengerahan SDM serta penanggulangan bencana saat darurat bencana di Provinsi NTT	Rp 135.284.000
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur BPBD Provinsi NTT Instansi Terkait Melalui Gladi Simulasi	Rp 94.501.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
		100%	6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	Rp 227.833.000
		100%	7 Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	Rp 71.008.000
		100%	8 Setup/Instalasi dan Pelatihan Operator Perangkat Komunikasi Radio	Rp 65.993.800
		100%	9 Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tk. Provinsi NTT	Rp 129.500.800
	- Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota	100%	1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Prov. NTT(Hibah)	Rp 958.580.000
		100%	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Rp 100.000.000
		100%	3 Pendataan Kerusakan, kerugian Serta Kebutuhan Pasca Bencana	Rp 187.946.000
		100%	4 Kordinasi kajian cepat penanganan bencana	Rp 211.993.720
	- Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	1 Operasional Kendaraan/Peralatan Penanggulangan bencana	Rp 80.000.000
Percepatan penanggulangan korban bencana	- Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT	100%	1 Pengadaan dukungan/stok logistik dalam rangka penanggulangan korban bencana	Rp 306.600.000
		100%	2 Fasilitasi Pendampingan Pendistribusian logistik, peralatan dan pengerahan staf dilokasi bencana	Rp 205.806.000
	- Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat	100%	1 Pengadaan PUSKODALOPS	Rp 230.292.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Pemulihan Pasca Bencana	- Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana	100%	1 Pemberian Bantuan Sosial Ekonomi Korban Bencana	Rp 224.420.000
	- Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana		1	

Gubernur Nusa Tenggara Timur



DRS. FRANS LEBU RAYA

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



TINI THADEUS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590822 198603 1 018



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Teratai Nomor 11 Tlp.(0380) 832617-Fax. 832671

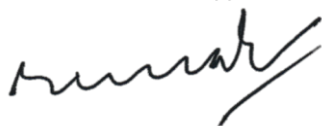
PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
			Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp3.895.252.320	Rp 3.634.326.507	93,30
Optimalisasi sistem kewaspadaan dini bencana	- Persentase sistem peringatan dini yang terpasang dan berfungsi	100%	1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pembuatan Media Cetak elektronik, Iklan, Pressrelies dan dialog interaktif (Kota Kupang dan 22 Kab/Kota)	Rp 78.274.000	Rp 73.374.000	93,74
	- Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana di NTT	100%	1. Advokasi Forum Pengurangan Risiko Bencana	Rp 229.636.000	Rp 217.190.870	94,58
		100%	2. Mitigasi Dalam Rangka Perlindungan Lokasi rawan Bencana	Rp 274.240.000	Rp 249.575.700	91,01
		100%	3. Bimbingan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Gender	Rp 83.344.000	Rp 83.344.000	100
		100%	4. Pelatihan Teknis Operasional dalam pengelolaan peralatan, logistik dan pengerahan SDM serta penanggulangan bencana saat darurat bencana di Provinsi NTT	Rp 135.284.000	Rp 133.281.400	98,52
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur BPBD Provinsi NTT Instansi Terkait Melalui Gladi Simulasi	Rp 94.501.000	Rp 87.716.781	92,82
		100%	6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Rehabilitasi Rekonstruksi (JITU-PB)	Rp 227.833.000	Rp 188.267.400	82,63
		100%	7 Penguatan Kapasitas Sistem Informasi Data Terpadu (SIMADU)	Rp 71.008.000	Rp 71.008.000	100
		100%	8 Pelatihan Operator Perangkat Komunikasi Radio	Rp 65.993.800	Rp 54.257.000	82,22
		100%	9 Rapat Penguatan Kelembagaan BPBD Tk. Provinsi NTT	Rp 129.500.800	Rp 112.200.000	86,64
	- Koordinasi Data dan Informasi penanganan kebencanaan di Kabupaten/Kota	100%	1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Prov. NTT(Hibah)	Rp 958.580.000	Rp 854.371.200	89,13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		100%	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Rp 100.000.000	Rp 99.634.000	99,63
		100%	3 Pendataan Kerusakan, kerugian Serta Kebutuhan Pasca Bencana	Rp 187.946.000	Rp 182.924.000	97,33
		100%	4 Kordinasi kajian cepat penanganan bencana	Rp 211.993.720	Rp 192.582.100	90,84
	- Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	1 Operasional Kendaraan/Peralatan Penanggulangan bencana	Rp 80.000.000	Rp 79.815.239	99,77
Percepatan penanggulangan korban bencana	- Jumlah bantuan darurat penanggulangan bencana di NTT	100%	1 Pengadaan dukungan/stok logistik dalam rangka penanggulangan korban bencana	Rp 306.600.000	Rp 305.200.000	99,54
		100%	2 Fasiltasi Pendampingan Pendistribusian logistik, peralatan dan pengerahan staf dilokasi bencana	Rp 205.806.000	Rp 202.004.208	98,15
	- Prosentase Kab/Kota yang membentuk Tim Reaksi Cepat	100%	1 Pengadaan PUSKODALOPS	Rp 230.292.000	Rp 228.271.700	99,12
Pemulihan Pasca Bencana	- Jumlah masyarakat penerima bantuan pemberdayaan Sosial Ekonomi pasca bencana	100%	1 Pemberian Bantuan Sosial Ekonomi Korban Bencana	Rp 224.420.000	Rp 219.308.909	97,72
	- Jumlah fasilitas umum dan hunian masyarakat yang direhabilitasi pasca bencana		1			

Gubernur Nusa Tenggara Timur



DRS. FRANS LEBU RAYA

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



TINI THADEUS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590822 198603 1 018

